



Systematic Literatur Review : Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia

Bernanda Anggita Davina Azzara

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bernanda.22085@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The Uninhabitable House Rehabilitation Program (RTLH) is a government policy aimed at improving the quality of housing for low-income communities while simultaneously supporting the acceleration of the eradication of extreme poverty. Although it has been implemented in various regions, the implementation of the RTLH program has shown varying achievements, thus requiring a comprehensive evaluation. This study aims to analyze the evaluation of the RTLH Program in Indonesia based on William N. Dunn's six policy evaluation indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research method used is a Systematic Literature Review (SLR) of scientific articles discussing the evaluation of the RTLH Program in various regions. The analysis was conducted by reviewing previous research findings based on the six policy evaluation indicators. The results of the study indicate that the RTLH Program is able to improve the quality of community housing and has received a positive response from beneficiaries. However, its implementation still faces obstacles such as budget limitations, equal distribution of beneficiaries, and data updates. Therefore, strengthening funding, data collection, and coordination between stakeholders is needed for more optimal and sustainable program implementation.*

Keywords: *Evaluation Policy; Literature Review; Low-Income Communities; Uninhabitable Housing; William N Dunn.*

Abstrak. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Meskipun telah dilaksanakan di berbagai daerah, pelaksanaan program RTLH menunjukkan capaian yang beragam sehingga memerlukan evaluasi yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Program RTLH di Indonesia berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel ilmiah yang membahas evaluasi Program RTLH di berbagai daerah. Analisis dilakukan dengan mengkaji temuan penelitian sebelumnya berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program RTLH mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mendapat respons positif dari penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, pemerataan penerima manfaat, serta pembaruan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendanaan, pendataan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan program lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan; Literatur Review; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Rumah Tidak Layak Huni; William N Dunn.

1. LATAR BELAKANG

Memenuhi kebutuhan pokok adalah hak dasar yang seharusnya dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan mereka seperti yang diharapkan. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah kemiskinan, di mana masyarakat, baik yang memiliki pekerjaan maupun yang tidak, masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk kehidupannya (Ering et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu strategis di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, bahkan politik (Idris et al., 2023). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain melalui pemberian bantuan, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, bantuan fisik berupa barang, maupun program pemberdayaan masyarakat (Idris et al., 2023). Berbagai bentuk bantuan tersebut diharapkan mampu menekan tingkat ketimpangan serta mempercepat penurunan angka kemiskinan di tengah masyarakat. Penyaluran bantuan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu agar dapat mencapai kualitas hidup yang lebih layak (Pangera et al., 2025). Jenis bantuan yang diberikan pun beragam, mulai dari pembebasan biaya listrik, bantuan sosial berupa santunan kematian, penyaluran bantuan gizi bagi bayi, program beras bagi keluarga miskin, santunan bagi anak yatim, hingga program pembangunan rumah layak huni (Idris et al., 2023). Di antara berbagai bentuk bantuan tersebut, program rumah layak huni memiliki peranan yang sangat penting karena hunian merupakan kebutuhan bagi setiap individu.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung serta memberikan rasa aman dan nyaman secara mental. Selain itu, rumah juga memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga privasi setiap anggota keluarga, serta harus memenuhi standar kesehatan agar tidak membahayakan penghuninya (Rujito, 2025). Oleh karena itu, setiap warga negara harus dapat mengakses perumahan yang layak sebagai bagian dari hak untuk hidup bermartabat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nabilah & Tawwakal, 2025).

Pemerintah telah memperkenalkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai upaya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan rumah yang lebih layak (Aryani, 2024). Program Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyediakan perbaikan rumah bagi masyarakat miskin yang memiliki atau menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni (Wibowo et al., 2022). Program ini tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik bangunan rumah, tetapi juga pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat fakir miskin. Program ini mendorong pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hunian yang layak serta penguatan aspek sosial dalam lingkungan keluarga (Dewi et al., 2025). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat tumbuh kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Selain

memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan yang layak, program ini juga berfungsi sebagai motivasi bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu terhindar dari berbagai permasalahan sosial lainnya (Ering et al., 2020).

Urgensi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) semakin terlihat ketika pemerintah memasukkannya ke dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (Khatimah & Suparti, 2025). Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyediaan rumah yang layak, menjadi salah satu cara utama untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024 (Pampur et al., 2024). Instruksi ini juga menekankan pentingnya kerja sama antar sektor agar program bantuan dapat saling terintegrasi, sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Setyobudi & Megawati, 2024). Dengan demikian, program rehabilitasi RTLH tidak lagi hanya dipandang sebagai program perumahan, tetapi menjadi bagian dari upaya nasional dalam pembangunan manusia.

Sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang penetapan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022–2024. Penetapan wilayah prioritas ini bertujuan agar program bantuan, termasuk rehabilitasi RTLH, dapat lebih difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui pemusatan anggaran dan koordinasi antar instansi (Aliatin et al., 2024). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan kemampuan pemerintah daerah, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta perbedaan hasil program antar wilayah.

Memasuki tahun 2025, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini menunjukkan perubahan pendekatan, dari yang sebelumnya berfokus pada wilayah tertentu menjadi optimalisasi pelaksanaan program secara nasional. Penekanan diberikan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penggunaan data sosial ekonomi yang lebih terpadu. Perubahan kebijakan ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan, termasuk program rehabilitasi RTLH, agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian evaluatif untuk menilai pelaksanaan dan efektivitas program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan perbaikan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai dasar perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program ke depan.

2. METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini, dilakukan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode Systematic Literature Review (SLR) adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan penelitian terkait fokus pada topik tertentu yang bertujuan untuk mengkaji, mengidentifikasi, menafsirkan atau mengevaluasi semua penelitian yang tersedia dan memiliki kriteria tertentu yang relevan (Sari, 2021). Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui analisis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji publikasi ilmiah yang membahas pelaksanaan serta evaluasi Program RTLH di berbagai daerah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penerapan kerangka evaluasi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai pelaksanaan Program RTLH, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi referensi dalam upaya perbaikan dan penguatan kebijakan di masa mendatang.

Menurut Khan dalam (Musdary et al., 2021) penelitian Systematic Literature Review dilaksanakan dengan melalui 5 tahap sebagai berikut:

Perumusan pertanyaan penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Q1 : Artikel tersebut terindeks dalam basis data jurnal apa saja?
- Q2 : Apakah artikel membahas tentang evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni?
- Q3 : Apakah program rehabilitasi rumah tidak layak huni memberikan dampak kepada masyarakat yang menerima sesuai target yakni masyarakat berpenghasilan rendah?

Pengumpulan literatur

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui situs Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni”. Selain itu, pencarian literatur dibatasi pada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021–2025 guna memastikan relevansi dan keterbaruan sumber yang digunakan dalam penelitian.

Reduksi atau penyaringan artikel

Proses reduksi atau penyaringan artikel dilakukan setelah tahap pengumpulan literatur dengan cara menyeleksi artikel yang relevan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi serta memilih artikel yang dapat digunakan sebagai sumber literatur dalam penelitian. Sementara itu, artikel yang tidak memenuhi kriteria seleksi akan dikeluarkan dari proses analisis.

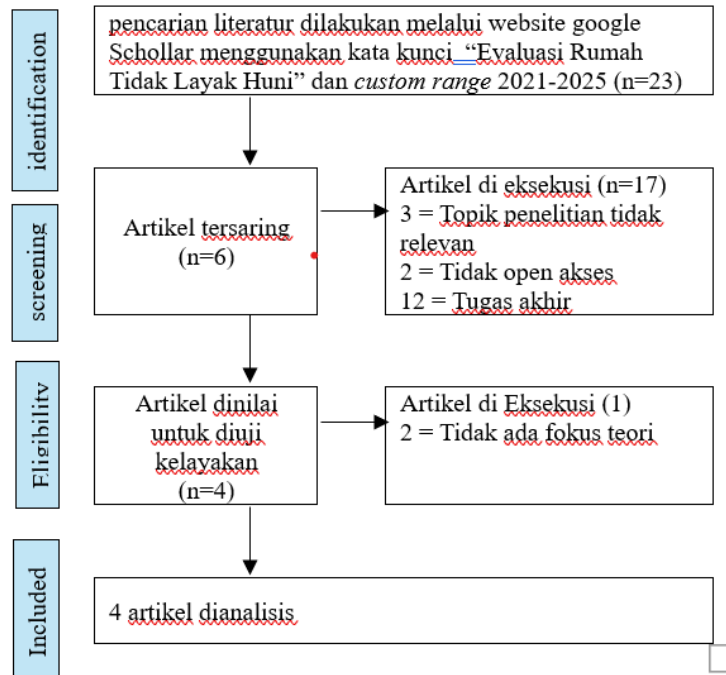
Analisis sistematis

Artikel yang telah dipilih selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan menelaah hasil penelitian pada masing-masing artikel. Proses analisis dilakukan dengan mempelajari temuan penelitian secara cermat, kemudian merangkum hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk ringkasan. Ringkasan tersebut disusun untuk memudahkan peneliti dalam memahami serta mengkaji temuan yang relevan dengan fokus penelitian secara lebih terarah.

Penyajian hasil

Penyajian hasil dilakukan setelah proses analisis terhadap artikel yang telah dipilih selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, hasil analisis disajikan secara sistematis dengan menampilkan temuan-temuan utama dari setiap artikel yang telah dikaji. Penyajian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun interpretasi dilakukan terhadap artikel-artikel yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah temuan utama dari setiap artikel yang relevan, kemudian menyusunnya secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk hasil *Systematic Literature Review* (SLR). Adapun alur proses eksklusi dan inklusi artikel dalam tahapan *systematic literature review* ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Bagan alir proses eksklusi dan inklusi artikel dalam tahapan SLR.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Q1 : Artikel tersebut terindeks dalam basis data jurnal apa saja?

Table 1. Identitas Jurnal.

Nama Jurnal	Jumlah
Jurnal Ilmiah Administrasita	1
Jurnal Ilmu Pemerintahan	1
Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Huaniodan dan Kebijakan Publik	1
Jurnal Riset Mahasiswa Dewantara	1
Total	4

Q2 : Apakah artikel membahas tentang evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Q3 : Apakah program rehabilitasi rumah tidak layak huni memberikan dampak kepada masyarakat yang menerima sesuai target yakni masyarakat berpenghasilan rendah?

Tabel 2. Rangkuman hasil analisis 4 artikel evaluasi RTLH.

No	Judul Jurnal	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Kasus Di Lampung Selatan, Indonesia) Oleh : (Aryani, 2024)	Deskriptif Kualitatif dengan teori evaluasi William n Dunn	Program Rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan secara umum telah memberikan dampak positif dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dari sisi efektivitas, program ini mampu menurunkan luas kawasan kumuh sebesar 10,83 hektare dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 3,27% menjadi 2,43%, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem. Dari aspek efisiensi, program dinilai cukup efisien karena dengan anggaran sebesar Rp5,34 miliar mampu memperbaiki 240 unit rumah, didukung oleh pendanaan APBN dan APBD serta partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Namun, dari sisi kecukupan dan pemerataan, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran menyebabkan cakupan rehabilitasi masih terbatas dan manfaat program belum merata di seluruh kawasan kumuh. Sementara itu, dari aspek responsivitas, program mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat penerima manfaat karena mampu memenuhi kebutuhan dasar hunian dan memperbaiki kondisi sanitasi. Dari sisi ketepatan, meskipun program belum sepenuhnya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, pelaksanaan Rutilahu tetap menunjukkan ketepatan arah kebijakan karena mampu mengurangi kawasan kumuh dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara bertahap.
2.	Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Tahun 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Oleh : (Putri et al., 2024)	Deskriptif kualitatif menggunakan teori evaluasi William N Dunn	Pada aspek efektifitas, Program rehabilitas RTLH sudah efektif dilaksanakan karena telah mencapai tujuan yakni tercapainya target yang telah ditentukan. Pada aspek kecukupan, dinilai cukup berhasil dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki kondisi hunian melalui bantuan stimulan sebesar Rp17.500.000. Meskipun terdapat kendala keterbatasan waktu pelaksanaan renovasi, program ini tetap memberikan dampak positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan. Aspek pemerataan, telah dilakukan secara merata dan tepat

sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Manfaat program dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kelurahan Kemalaraja dan Kelurahan Talang Jawa, serta terdapat harapan agar program ini terus dilanjutkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Aspek responsivitas, memiliki tingkat responsivitas yang tinggi karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari tahap pendataan, sosialisasi, hingga pelaksanaan program. Masyarakat penerima manfaat menyatakan puas terhadap kejelasan informasi, dukungan pemerintah daerah, serta dampak positif program dalam memperbaiki kondisi rumah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Aspek ketepatan, tepat sasaran karena penerima bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, berdasarkan proses verifikasi dan survei ulang. Ketepatan sasaran ini didukung oleh kerja sama antara Dinas Perkim, kelurahan, dan masyarakat, sehingga program tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

3. Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020
Oleh : (Gunadi et al., 2023)

Deskriptif kualitatif dengan teori evaluasi William n Dunn

Pada dimensi efektivitas, pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum sepenuhnya mencapai tujuan dan hasil sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karena meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, seluruh tahapan kegiatan tetap dapat diselesaikan sesuai rencana. Pada aspek kecukupan, kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni dinilai cukup berkontribusi dalam mengurangi permasalahan hunian tidak layak yang dihadapi masyarakat di Kota Cimahi. Selanjutnya, pada aspek pemerataan, kebijakan ini telah terlaksana secara relatif merata, ditandai dengan adanya kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok sasaran. Dari aspek responsivitas, penerima manfaat menunjukkan apresiasi

terhadap adanya program ini, meskipun besaran bantuan stimulan yang diberikan dinilai belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan biaya perbaikan rumah. Sementara itu, pada aspek ketepatan, kebijakan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dinilai tepat sasaran karena mampu menjawab permasalahan di bidang perumahan sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Evaluasi Program Deskriptif kualitatif
Rehabilitas Rumah tidak dengan teori
Layak Huni (RTLH) di evaluasi William n
Kota Depok (Studi Kasus Dunn
Kecamatan Sukmajaya)
Oleh : (Syafitri et al., 2024)
- Pada aspek efektivitas, pencapaian program bantuan RTLH telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2018, yakni ditujukan kepada masyarakat miskin. Namun, dari aspek efisiensi, anggaran sebesar Rp 23.000.000 per unit yang dialokasikan Pemerintah Kota Depok belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni tanpa dukungan dana swadaya dari penerima manfaat. Pada aspek kecukupan, masyarakat penerima bantuan tidak diperbolehkan kembali menerima bantuan yang sama ataupun bantuan dari sumber anggaran lain, kecuali jika rumah mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dari aspek responsivitas, masyarakat memberikan respons positif karena program ini dinilai sangat membantu dan mendorong keterlibatan mereka dalam mempertanggungjawabkan hasil program. Sementara itu, pada aspek ketepatan, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran, antara lain jarak waktu antara proses pengusulan dan pelaksanaan yang terlalu panjang sehingga menyebabkan perubahan fungsi hunian menjadi kontrakan atau bengkel, serta beberapa penerima manfaat memperbaiki rumah dengan dana mandiri sebelum pelaksanaan program. Selain itu, terbatasnya tenaga tukang akibat pelaksanaan program RTLH dari sumber lain seperti Rutilahu dan BSPS turut menghambat capaian program sehingga indikator pelaksanaan belum mencapai 100% dan masih tersisa pagu anggaran.
-

Pembahasan

Berdasarkan temuan dari empat jurnal yang diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan pola permasalahan yang serupa, baik dari sisi kebijakan, pelaksana program, maupun kondisi masyarakat penerima manfaat. Permasalahan seperti keterbatasan anggaran, cakupan program yang belum merata, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program menunjukkan bahwa implementasi RTLH belum sepenuhnya optimal. Selain itu, ketergantungan pada bantuan stimulan yang terbatas dan partisipasi masyarakat sebagai penopang utama pelaksanaan program mengindikasikan bahwa keberhasilan program masih bersifat parsial dan kontekstual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memberikan manfaat positif dalam jangka pendek, masih terdapat sejumlah kelemahan yang bersifat struktural dan memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, diperlukan evaluasi lanjutan terhadap program tersebut dengan menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas., dan ketepatan (Cahyani & Puspaningtyas, 2023) untuk menilai capaian dan permasalahan Program RTLH sebagai berikut:

Efektivitas

Menurut William N. Dunn, efektivitas adalah indikator seberapa sukses suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, indikator efektivitas menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH/Rutilahu) pada umumnya mampu mencapai tujuan utama perbaikan kualitas hunian dan penurunan kemiskinan, meskipun dengan tingkat capaian yang berbeda antar daerah. Studi (Aryani, 2024) dan (Putri et al., 2024) menunjukkan efektivitas yang tinggi, ditandai dengan penurunan kawasan kumuh dan kemiskinan ekstrem serta tercapainya target penerima manfaat. Namun, berbeda dengan temuan (Gunadi et al., 2023) di Kota Cimahi yang menyatakan bahwa efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena hasil kebijakan belum sesuai dengan tujuan awal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah, kapasitas pemerintah daerah, dan cakupan program.

Efisiensi

Menurut William N. Dunn, efisiensi adalah ukuran sejauh mana suatu kebijakan atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam penelitian ini, Dari sisi efisiensi, hasil kajian menunjukkan adanya variasi antara daerah yang mampu mengoptimalkan

sumber daya dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Program di Lampung Selatan dinilai cukup efisien karena mampu memperbaiki ratusan unit rumah dengan anggaran terbatas dan dukungan gotong royong masyarakat (Aryani, 2024). Sebaliknya, studi di Kota Depok (Syafitri et al., 2024) menunjukkan bahwa alokasi anggaran per unit belum mencukupi sehingga penerima manfaat masih harus menambah dana secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh strategi pelaksanaan dan dukungan sumber daya lokal.

Kecukupan

Menurut William N. Dunn, kecukupan mengacu pada kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, Indikator kecukupan menunjukkan bahwa program RTLH secara umum mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan perumahan secara menyeluruh. (Putri et al., 2024) dan (Gunadi et al., 2023) menyatakan bahwa bantuan stimulan cukup membantu perbaikan rumah, tetapi masih terdapat keterbatasan seperti waktu renovasi yang singkat dan besaran bantuan yang belum mencukupi kebutuhan riil. Sementara itu, (Aryani, 2024) menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pengurangan kawasan kumuh belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan program masih bergantung pada kesinambungan pendanaan dan dukungan lintas sektor.

Perataan

Menurut William N. Dunn, perataan adalah upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan menjangkau kelompok sasaran secara adil dan merata tanpa perlakuan diskriminatif apa pun. Dalam penelitian ini, program RTLH relatif lebih baik di wilayah dengan pendataan dan sosialisasi yang kuat. Studi (Putri et al., 2024) dan (Gunadi et al., 2023) menemukan bahwa program telah dilaksanakan secara merata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena penerima bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat miskin. Namun, (Aryani, 2024) mencatat bahwa keterbatasan cakupan wilayah menyebabkan manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh kawasan kumuh. Temuan ini mengindikasikan bahwa perataan program masih menjadi tantangan, terutama di daerah dengan wilayah kumuh yang luas dan anggaran terbatas.

Responsivitas

Menurut William N. Dunn, responsivitas adalah sejauh mana suatu program beradaptasi dan memberikan respons yang tepat terhadap tantangan, perubahan, dan kebutuhan populasi sarannya. Dalam penelitian ini, Indikator responsivitas secara konsisten menunjukkan hasil

yang positif di keempat studi. Masyarakat penerima manfaat memberikan tanggapan yang baik terhadap program RTLH karena dinilai mampu menjawab kebutuhan dasar hunian, meningkatkan sanitasi, dan mengurangi risiko penyakit. (Putri et al., 2024) dan (Syafitri et al., 2024) menekankan bahwa proses sosialisasi, pendataan, dan pendampingan yang jelas berkontribusi terhadap tingginya kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara implementatif, program RTLH memiliki tingkat penerimaan sosial yang tinggi.

Ketepatan

Menurut William N. Dunn, ketepatan suatu program diukur dari kemampuannya mencapai tujuannya, yang ditetapkan secara tepat dan akurat, dengan mempertimbangkan kriteria evaluasi yang relevan. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar program RTLH telah tepat sasaran, namun masih terdapat kendala administratif dan teknis. Studi (Putri et al., 2024) dan (Gunadi et al., 2023) menyatakan bahwa penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah pemilik rumah tidak layak huni. Namun, (Syafitri et al., 2024) menemukan adanya kendala seperti jeda waktu pengusulan dan pelaksanaan yang panjang serta perubahan fungsi hunian, yang berdampak pada menurunnya ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan program sangat bergantung pada kualitas data, kecepatan proses, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 4 jurnal yang telah dianalisis, sama-sama membahas mengenai evaluasi kebijakan program rumah tidak layak huni, namun yang membedakan yaitu lokasi penelitian dan indeks jurnal. Meskipun topiknya serupa, setiap penelitian menghadirkan perspektif dan temuan yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Berdasarkan fokus Systematic literatur review dari penelitian terdahulu tersebut dilakukan analisis berdasar 6 indikator evaluasi menurut William N Dunn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, indikator pertama Efektivitas Program Rehabilitasi RTLH pada umumnya telah efektif dalam memperbaiki kualitas hunian dan menurunkan kemiskinan, namun tingkat keberhasilannya berbeda antar daerah tergantung pada kapasitas pemerintah daerah, konteks wilayah, dan cakupan program. Efektivitas program masih cenderung berorientasi pada capaian fisik dan belum sepenuhnya mencerminkan dampak kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan bahwa Program RTLH tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi sebaiknya tidak hanya melihat jumlah rumah

yang diperbaiki, tetapi juga perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan. Selain itu, pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

Indikator Efisiensi, pelaksanaan Program RTLH menunjukkan hasil yang bervariasi, di mana beberapa daerah mampu mengoptimalkan anggaran dan sumber daya, sementara daerah lain masih membebankan kekurangan biaya kepada masyarakat penerima. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi belum sepenuhnya merata dan sangat bergantung pada strategi implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, Peningkatan efisiensi program dapat dilakukan dengan menyesuaikan besaran bantuan berdasarkan kondisi rumah dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan pihak lain agar keterbatasan anggaran tidak menjadi beban tambahan bagi penerima manfaat. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, hasil program dapat dicapai tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.

Indikator Kecukupan, Program RTLH dinilai cukup membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun belum sepenuhnya mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni secara menyeluruh. Keterbatasan besaran bantuan, waktu renovasi, dan anggaran daerah menjadi faktor utama belum tercapainya kecukupan program. Oleh karena itu, Program RTLH perlu dirancang agar tidak bersifat sementara, tetapi mampu menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni secara lebih menyeluruh, dukungan anggaran yang berkelanjutan dan keterpaduan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya perlu diperkuat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya cukup untuk perbaikan awal, tetapi juga mampu meningkatkan kondisi hunian secara berkelanjutan.

Indikator Perataan program RTLH telah berjalan cukup baik di wilayah dengan sistem pendataan dan sosialisasi yang kuat, namun secara nasional manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata akibat keterbatasan cakupan wilayah dan anggaran. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan distribusi manfaat antar daerah. Oleh karena itu, Agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata, pemerintah perlu melakukan pendataan yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap masyarakat yang membutuhkan. Wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kawasan kumuh yang tinggi perlu menjadi prioritas utama. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai kriteria dan penerima bantuan penting untuk mencegah ketimpangan dan kecemburuan sosial.

Indikator Responsivitas Program RTLH tergolong tinggi karena mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memperoleh tanggapan positif dari penerima manfaat. Proses sosialisasi, pendataan, dan pendampingan yang jelas menjadi faktor utama tingginya

penerimaan masyarakat terhadap program. Oleh karena itu, Responsivitas program dapat ditingkatkan dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi yang jelas serta pendampingan selama pelaksanaan perlu terus dilakukan. Pemerintah juga sebaiknya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keluhan agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.

Indikator Ketepatan Program RTLH pada dasarnya telah tepat sasaran karena penerima bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah pemilik rumah tidak layak huni. Namun, ketepatan pelaksanaan masih terkendala oleh masalah administratif, keterlambatan pelaksanaan, dan perubahan kondisi penerima manfaat. Oleh karena itu Untuk menjaga ketepatan sasaran, pemerintah perlu memastikan data penerima bantuan selalu diperbarui dan diverifikasi secara langsung. Proses administrasi yang terlalu lama sebaiknya disederhanakan agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan agar program benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Aliatin, N., Indartuti, E., & Rahmadanik, D. (2024). Evaluasi kebijakan program bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu (rumah tidak layak huni) di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(35), 23–36.
- Aryani, L. (2024). Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (kasus di Lampung Selatan, Indonesia). *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(2), 211–222. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i2.868>
- Dewi, R. S., Rahmawati, R., & Luthfie, M. (2025). Strategi implementasi program bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3052–3061. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i4.1591>
- Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2020). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Negara (ADMINISTRO)*, 2(2), 39–48.
- Gunadi, B., Kostini, N., & Alexandri, M. B. (2023). Evaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 5, 321–341.
- Idris, F., Mukhrijal, & Rasanjani, S. (2023). Efektivitas program rumah layak huni dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 37–50. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3136>
- Khatimah, H., & Suparti, H. (2025). Implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa

- Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 8(1).
- Musdary, F., Amalia, L., Maulana, R., Lubis, A., Ningsih, W., & Universitas Negeri Medan. (2021). Systematic review: Efektivitas *Ideonella sakaiensis* dan *Chlamydomonas reinhardtii* sebagai agen biodegradasi plastik berbahan dasar PET. *Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi*, 4.
- Nabilah, A. N. F., & Tawwakal, G. T. I. (2025). Mewujudkan hunian layak: Studi implementasi program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kudus. *Journal of Governance and Policy*, 5(3), 1–12.
- Pampur, F., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni melalui e-Rutilahu bagi keluarga miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 93–104. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/download/8076/3892>
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592.
- Putri, T. O., Lestari, A., & Susanti, E. (2024). Evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3, 27–31.
- Rujito, S. (2025). Kebijakan dan strategi penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 32–54. <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>
- Sari, Y. K. (2021). *Studi meta-analisis pengaruh pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa* (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia. <https://repository.upi.edu/64702/>
- Setyobudi, G. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng Kota Surabaya. *Publika*, 12(1), 268–277. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p253-263>
- Syafitri, A., Subagyo, W. H., Nababan, B. O., & Muhlis. (2024). Evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok (studi kasus Kecamatan Sukmajaya). *Jurnal Riset Mahasiswa Dewantara*, 6.
- Wibowo, R. A., Purba, A., & Despa, D. (2022). Evaluasi program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Pringsewu.